

## Partisipasi politik perempuan dalam kiprah dakwah partai keadilan sejahtera

Siti Khadijah <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Komunikasi, Sastra dan Bahasa Universitas Islam 45 Bekasi

\* Korespondensi: siti\_khadijah@unismabekasi.ac.id

Received Date: Desember 8, 2023

Revised Date: December 27, 2023

Accepted Date: January 26, 2024

Cite This Article:

Khadijah, S. (2024). Partisipasi Politik Perempuan dalam Kiprah Partai Keadilan Sejahtera. *The Journal of Religion and Communication Studies*, 1(1), 1-12.

<https://doi.org/10.61511/jorcs.v1i1.2024.518>



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze PKS's strategy to build women's political participation in its da'wah activities. The crisis of democracy is rationally caused by the lack of formal participation of the community, especially women in national politics. PKS has not maximized in utilizing alternative forms of women's participation through social media to fulfill affirmative policies. The efforts made by PKS have not been maximized in utilizing the strong influence of the media effects of the 4.0 era to increase women's political participation. The theoretical reference used is the theory proposed by Aeron Davis "Citizens, media effect and public participation". The concept of women's political participation in political parties can be brought closer to the term Ummah. This word is repeated 64 times in the word of Allah S.W.T, which is found among others in the 3rd surah (Ali-Imran) verse 110 and the 2nd surah (al-Baqarah) verse 143 and the 3rd surah (Ali-Imran) verse 110. Khyar means the best option, found in QS. As-Shaad [38]: 47. 'Aqibah which means impact or effect which in the Qur'an is mentioned 31 times of which is found in QS. Al-A'raf [7]: 128. This research paradigm is a critical paradigm using da'wah communication approaches, political communication, political parties and women's political participation. The research method consists of a type of research, namely descriptive qualitative. From this research, it can be seen that PKS encourages women to actively participate in politics as a manifestation of healthy democracy. Political awareness is built by conducting cadres every week through Ta'lim. The media used by PKS to build women's political participation is predominantly carried out through direct communication and is still minimal in the use of social media.*

**Keywords:** political participation; women; media

### Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi PKS membangun partisipasi politik perempuan dalam kiprah dakwahnya. Krisis demokrasi secara rasional disebabkan oleh minimnya partisipasi formal masyarakat, khususnya perempuan dalam perpolitikan nasional. Belum maksimalnya PKS dalam memanfaatkan bentuk alternatif partisipasi kaum perempuan melalui media sosial untuk memenuhi kebijakan afirmatif. Belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh PKS dalam memanfaatkan pengaruh kuat efek media era 4.0 untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Rujukan teori yang dipergunakan adalah teori yang dikemukakan Aeron Davis "Citizens, media effect and public participation". Konsep partisipasi politik perempuan dalam partai politik dapat di dekatkan dengan istilah Ummah. Kata ini 64 kali diulang dalam firman Allah S.W.T, yang terdapat diantaranya pada surat ke-3 (Ali-Imran) ayat 110 dan surat ke 2 (al-Baqarah) ayat 143 dan surat ke-3 (Ali-Imran) ayat 110. Khyar bermakna pilihan terbaik, terdapat dalam QS. As-Shaad [38]: 47. `Aqibah yang bermakna dampak atau efek yang dalam al-Qur'an disebutkan 31 kali diantaranya terdapat pada QS. Al-A'raf [7]: 128. Paradigma riset ini adalah paradigma kritis dengan menggunakan pendekatan komunikasi dakwah, komunikasi politik, partai politik dan partisipasi politik perempuan. Metode penelitian terdiri dari jenis

penelitian yakni kualitatif deskriptif. Dari penelitian ini dapat diketahui jika PKS mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik sebagai perwujudan demokrasi yang sehat. Kesadaran politik dibangun dengan melakukan pengkaderan setiap pekannya melalui Ta'lim. Media yang digunakan oleh PKS untuk membangun partisipasi politik perempuan dominan dilakukan melalui komunikasi langsung dan masih minim dalam penggunaan media sosial.

**Keywords:** media; partisipasi politik; perempuan

---

## 1. Pendahuluan

Pandangan bahwa perempuan dianggap lemah atau tidak sempurna karena perbedaan biologis telah lama menjadi bagian dari stereotip gender yang tidak akurat. Sudah banyak penelitian ilmiah dan perubahan sosial yang menunjukkan bahwa perbedaan biologis tidak seharusnya menjadi dasar untuk mengukur kekuatan atau kelemahan seseorang. Hal ini menjadi alasan untuk membatasi perempuan berpartisipasi aktif dalam partai politik. Partai politik dan ideologi memang seringkali terkait erat dan saling memengaruhi dalam dunia politik. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai, gagasan, serta keyakinan yang pada dasarnya membentuk pandangan dunia dan tujuan politik suatu kelompok atau partai. Sementara itu, partai politik adalah organisasi yang di dalamnya anggotanya bekerja untuk mencapai tujuan politik berdasarkan ideologi yang mereka anut.

PKS sebagai Partai politik da'wah yang mengusung nilai-nilai Islam, Konsep hegemoni melalui ideologi dan kegiatan kultural partai merujuk pada upaya suatu partai politik atau kelompok untuk mendominasi dan mempengaruhi opini serta nilai-nilai dalam masyarakat dengan cara menggunakan ideologi dan kegiatan budaya. Ini dapat melibatkan upaya untuk merumuskan dan mempromosikan narasi, norma, dan nilai-nilai yang sesuai dengan ideologi partai tersebut, dengan tujuan mendapatkan dukungan dan kontrol atas berbagai aspek kehidupan sosial. Hal ini berimplikasi terhadap pemaknaan politik peran aktif politik laki-laki dan perempuan. Masyarakat menilai PKS dianggap menolak partisipasi aktif politik perempuan dan lebih mengutamakan laki-laki.

Berdasarkan perspektif pengalaman perempuan, mudah untuk melihat bahwa lembaga-lembaga perwakilan demokratis dapat menjadi alat penindasan. Lembaga-lembaga demokrasi formal merupakan suatu bentuk pemerintahan yang hanya mengatur perempuan secara formal yang kemudian "dilarang" memegang kekuasaan. Jika ada perempuan terpilih untuk memimpin maka perempuan cenderung memerintah dan diperintah secara tidak setara seperti, jumlah perwakilan perempuan jauh lebih rendah dibandingkan jumlah perwakilan laki-laki. Selain itu, lembaga perwakilan informal, misalnya kelompok kepentingan, tampaknya tidak berhasil menjadikan perempuan yang berkuasa sebaik laki-laki yang berkuasa (Strolovitch, 2007). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa lembaga perwakilan yang demokratis perlu dikritisi terkait dengan partisipasi perempuan di ranah politik. Kita tidak boleh berasumsi bahwa lembaga perwakilan di negara demokrasi selalu memberikan manfaat bagi seluruh perempuan

Kebijakan afirmatif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 12 Thn 2003 mengenai Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, memang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dengan menetapkan target keterwakilan minimal perempuan sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebesar 30%. Realitas di lapangan menunjukkan posisi perempuan diparlemen pada tahun 2021-2022 masih kurang dari 30% (Badan Pusat Statistik, 2023), termasuk PKS. Stigma atau stereotip yang menganggap bahwa perempuan belum mampu atau tidak sesuai terlibat dalam urusan politik adalah suatu pandangan yang tidak akurat dan telah lama menjadi isu gender. Terbatasnya akses dan dukungan yang cukup bagi perempuan untuk terlibat dalam politik serta literasi media digital yang masih rendah. Ketiga hal tersebut memberikan sumbangsih mengapa kebijakan afirmatif ini masih sulit dipenuhi.

Namun kebijakan di atas mengalami kesulitan untuk dicapai karena banyak faktor. Sejarah menunjukkan bahwa perempuan di banyak masyarakat, termasuk Indonesia, telah mengalami penindasan dalam berbagai bentuk, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Sistem patriarki, di mana kehidupan masyarakat diorientasikan pada kepentingan pria, menjadi salah satu faktor utama yang membatasi peran perempuan..

Islam sesungguhnya tidak membatasi kiprah perempuan dalam bermasyarakat dan berpolitik. Upaya membangun partisipasi politik perempuan dapat dibangun melalui edukasi politik. Al-Qur'an sebagai sumber hukum menyebutkan jika antara kaum adam dan hawa tidak ada perbedaan (Huda & Dodi, 2020), karena mendapat kemuliaan yang sama di hadapan Sang Pencipta sebagaimana dalam QS. Al-Isra' [17]: 70 disebutkan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna" (QS. al-Isra' [17]: 70).

PKS dikenal memiliki ideologi nasionalis agamis, yang mencerminkan pandangan bahwa ideologi negara dan ideologi agama Islam digunakan sebagai landasan untuk keadilan dan kesejahteraan nasional. Ini menunjukkan pendekatan holistik terhadap agama dan politik (Asy'ari, 2010). PKS dianggap sebagai fenomena unik dalam politik Indonesia karena perannya sebagai partai Islam yang secara terbuka berpartisipasi dalam sistem politik yang cenderung sekuler. Keberadaan PKS mencerminkan keragaman politik di Indonesia dan kompleksitas dinamika antara Islam dan politik. Sejarah PKS yang bermula dari Partai Keadilan pada tahun 1998 menunjukkan asal-usulnya yang erat dengan aktivis kampus dan Jama'ah Tarbiyah. Partai ini dideklarasikan resmi pada tanggal 9 Agustus 1998, yang mencerminkan awal dari partisipasi aktifnya dalam politik Indonesia.

PKS berusaha memperkenalkan politik praktis kepada kader-kader perempuan dan juga masyarakat perempuan lainnya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang memiliki kebijakan yang memberikan kesempatan lebih besar bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik. Ini mencerminkan langkah-langkah yang diambil oleh partai untuk mendorong partisipasi perempuan dalam arena politik. Benar bahwa hubungan antara dakwah (penyampaian ajaran Islam) dan politik dalam konteks Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sering menjadi perbincangan kontroversial di masyarakat Indonesia. Pertentangan antara identitas gerakan dakwah dan identitas politik PKS mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan politik dalam konteks Indonesia, terutama terkait penafsiran dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan politik. PKS menggunakan ajaran agama, terutama Islam, sebagai dasar ideologis dan legitimasi untuk kebijakan dan keputusan politik yang diambil. Ini mencakup penekanan pada moralitas, etika, dan nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan politik. Struktur organisasi PKS mungkin mencerminkan prinsip-prinsip ajaran Islam, baik dalam pembentukan kepengurusan partai maupun dalam pengambilan keputusan internal. Ini dapat mempengaruhi tata kelola dan hierarki partai. Dalam konteks ajaran Islam, PKS mungkin memandang peran laki-laki dan perempuan secara berbeda. Implikasinya dapat terlihat dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam partai, serta dalam konsep-konsep tertentu mengenai peran gender. Dalam tataran politik praktis dan politis pandangan PKS terhadap kepemimpinan dan partisipasi politik anggota laki-laki dan perempuan dianggap menentang kesetaraan gender.

Data menunjukkan, jumlah Caleg (Calon Legislatif) berjenis kelamin lebih dominan ketimbang perempuan fakta ini memperlihatkan jika hak politik perempuan yang fundamental tidak mampu dipenuhi oleh PKS. Selain itu, ada pendapat yang menyebutkan jika Aleg (Anggota legislatif) perempuan yang terpilih sangat minim bahkan tidak memiliki suara dalam mengemukakan pendapatnya di PKS yang ranahnya di dominasi kaum laki-

laki. Apakah hal ini benar adanya, penting dan menarik untuk dikaji. Seperti apa partisipasi politik perempuan agar krisis demokrasi tidak nyata terjadi.

## 2. Perspektif Teori: Citizens, media effect and public partisipation Komunikasi Politik

Teori-teori yang dikemukakan oleh Aeron Davis (Davis, 2019) menjadi teori utama yang mengungkapkan pentingnya partisipasi politik dan keterlibatan publik (masyarakat) untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan memberi legitimasi pada pemerintah. Dalam bab tiga dari buku Aeron Davis diungkapkan bahwa terdapat empat sub tema pembahasannya, namun sub tema ketiga dan keempat dijadikan satu karena memiliki esensi yang hampir sama, yakni tentang efek media.

### a. Kewargaan, Rasionalitas dan Krisis Partisipasi Formal Masyarakat

Partisipasi publik dapat meruntuhkan pemerintahan yang sewenang-wenang dan mendorong negara pada titik kritis. Demokrasi yang sehat akan mendorong individu terlibat dalam beragam peristiwa publik di berbagai level (Dewey, 2012). Institusi politik dan media harus diarahkan kepada besarnya partisipasi partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa institusi politik dan media dapat menggambarkan cara dan sarana yang digunakan menuju demokrasi yang terbuka (Dryzek, 2002; Fishkin, 1991; Macpherson, 1962).

Perkebangan abad ke-20, telah memberikan dampak pada perubahan ekosistem politik. Partai-partai berkembang, menjadi lebih nasional dan profesional, kurang ideologis dan lebih berorientasi pada kelompok masyarakat yang lebih besar. Masyarakat menjadi kurang mau terikat pada partai tertentu, dengan menurunnya keanggotaan berbayar dan melemahnya keberpihakan partisan pada partai-partai yang ada (Dalton, 2004). Perubahan ini didorong oleh pergeseran masyarakat yang lebih luas (sisi permintaan) atau oleh dinamika internal partai-partai itu sendiri (sisi penawaran).

Crouch menjelaskan jika bentuk sistem politik demokrasi bervariasi dalam mendorong kearah partisipasi yakni bisa berupa bentuk partisipasi "minimal", "representatif" atau partisipasi "maksimal" dan "langsung" Pengaruh media kumulatif dapat mewujudkan demokrasi deliberasi dalam bentuk pengambilan keputusan dalam aroma pragmatis, emansipatif, dan inklusif berdasarkan debat rasional (Crouch, 2004).

Pemimpin negara sebagai pemegang kekuasaan yang akan menentukan arah politik. Kemakmuran suatu negara tidak ditentukan oleh kondisi geografis, budaya, bahkan kecerdasan pemimpinnya, namun ditentukan oleh tujuan atau arah politik pemimpinnya. Politik menentukan hukum yang berlaku, lembaga-lembaga ekonomi yang terbentuk, kebebasan masyarakat, dan apapun yang terjadi pada suatu negara. Singkatnya, politik merupakan kunci kemakmuran suatu negara (Acemoglu & Robinson, 2012).

Menurut Inglehart, kegagalan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi disebabkan oleh ketidakpedulian dan ekspektasi yang berlebihan namun tidak beralasan (Inglehart & Norris, 2016). Kebanyakan masyarakat berpartisipasi tanpa komitmen yang kuat dan tindakan yang aktual. Putnam mengatakan, masyarakat di zaman modern menjadi lebih terisolasi dan individual dari biasanya seperti yang terjadi di Amerika dan Italia dimana orang-orang lebih memilih untuk sendiri daripada bergabung dengan orang lain. Modernisasi, suburbanisasi, dan hiburan elektronik berkontribusi besar dalam membuat seseorang sibuk melakukan urusannya sendiri dan kehilangan modal sosial atau interaksi sosialnya sehingga tidak berinteraksi dalam institusi politik nasional.

Gambaran yang lebih besar menunjukkan jika mereka yang cenderung berhasil dalam demokrasi kapitalis kontemporer juga lebih besar kemungkinannya untuk terlibat. Mereka akan bertaruh besar untuk memperoleh keuntungan dari hal tersebut.

## b. Bentuk Alternatif dari Partisipasi

Aeron Davis mengemukakan bahwa media baru telah menawarkan banyak banyak peluang baru bagi masyarakat secara keseluruhan untuk terlibat secara langsung dengan partai politik dan pemerintah. Dampak partisipasi alternatif ini sejak beberapa tahun lalu sudah mulai terlihat, mulai dari lembaga-lembaga negara yang telah mulai menyediakan informasi rinci tentang proses parlementer terhadap publik. Mereka mengelola konsultasi publik *online* dan memfasilitasi petisi elektronik. Partai sekarang dapat berkonsultasi lebih banyak dengan anggota biasa, mengumpulkan dana, menyebarkan berita dan informasi politik alternatif, dan mengatur kegiatan lokal.

Kedua, ekologi digital baru dapat meningkatkan partisipasi melalui bentuk-bentuk alternatif organisasi dan jaringan politik. Dengan demikian, kelompok kepentingan seperti organisasi lingkungan dapat terlibat dalam politik dan pembentukan kebijakan pemerintah. Pengaruh media kumulatif dapat mengubah cara seseorang berhubungan dengan masyarakat dan urusan politik. Secara lebih umum, teori Noelle Neumann "*Spiral of Silence*" menjelaskan bahwa individu takut terisolasi dalam pendapat mereka dan keluar dari langkah dengan ide-ide dominan dan nilai dalam masyarakat. Akibatnya, individu-individu memiliki kecenderungan untuk menganut pandangan yang berlaku yang mereka lihat berulang kali di media (Noelle-Neumann, 2014).

Teori media malaise mendalilkan, bahwa liputan televisi kritis menurunkan kepercayaan publik dalam politik dan mendorong ketidakpuasan secara umum. Adapun menurut Mc Combs dan Shaw dalam teori Agenda Setting atau Framing berpendapat bahwa efek utama media bukanlah memberi tahu orang "apa yang dipikirkan" tetapi memberitahu orang "apa yang harus mereka pikirkan" (McCombs & Shaw, 1972). Karya mereka menunjukkan korelasi yang kuat antara topik berita yang sering diinput dan isu-isu yang dianggap "paling penting" oleh orang-orang. Jika media memilih untuk meliput lebih banyak berita tentang kejahatan, imigrasi atau terorisme, maka orang berpikir bahwa itu adalah masalah politik prioritas. Salah satu konsekuensi yang jelas dari hal ini adalah bahwa politisi dan partai yang mempromosikan agenda populis tertentu mendapatkan lebih banyak publisitas.

Sebagian besar liputan berita utama Donald Trump selama pemilihan pendahuluan dan periode pemilihan 2016, meskipun umumnya negatif, tetap menjadi sorotan publik padanya (Inglehart & Norris, 2016). Dia memperoleh liputan yang jauh lebih banyak dibanding saingannya dari Partai Republik. Jadi, negatif atau tidak, orang banyak berpikir tentang Donald Trump. Orang-orang memilih untuk mengikuti teman, jaringan, media, situs web, dan cerita yang mereka setuju sambil menghindari yang mereka tidak setuju. Publik tidak kalah tertariknya dengan politik, berita, dan urusan publik. Mereka hanya merasa ditinggalkan oleh lembagalembaga dan cara politik tradisional di pusat mereka. Semakin pusat-pusat politik profesional berjuang dengan kompleksitas kebijakan, kekuatan global yang kuat, dan kemarahan pemilih, mereka semakin memblokade diri mereka sendiri. Media dan komunikasi tetap menjadi pusat politik bahkan ketika ekologi media berita terus berubah dan individu menjadi lebih paham media dan aktif. Bagaimana dan mengapa efek media beroperasi juga dapat berubah tetapi terus memberikan pengaruh.

Opini Publik melalui media. Menurut Aeron Davis, terdapat beberapa karakteristik untuk mempengaruhi opini publik melalui media. Pertama, mereka yang menjadi pusat kekuasaan dalam politik, bisnis, dan media, masih mengonsumsi berbagai media warisan dan mengaitkannya dalam politik sehari-hari. Agenda dan bingkai yang dimediasi tetap sangat berpengaruh pada tingkat ini. Meskipun para politisi skeptis terhadap media, mereka masih percaya bahwa media itu sangat berpengaruh.

Kedua, media berita, dalam segala bentuknya, masih menjadi jalan utama publik dan bidang kebijakan yang beragam. Penjelasan teori sosialisasi dan ekonomi untuk pola pemungutan suara sekarang agak kurang masuk akal. Jika pemilih lebih mobile dan semakin banyak, kehilangan keberpihakan politik dan kelas (ras) alami mereka maka sosialisasi tampaknya tidak lagi menjelaskan pola pemungutan suara.

Ketiga, masih ada tingkat tumpang tindih yang tinggi antara semua jenis media berita. Semua memilih untuk meliput dan mengomentari peristiwa dan cerita besar, seperti pemilihan umum, bencana, skandal publik, acara olahraga besar, dan sebagainya. Situs berita alternatif, agregator, penyebar, sangat bergantung secara simbiosis dan homogen pada operasi berita warisan untuk konten inti. Mereka mungkin menawarkan pendapat dan penekanan yang berbeda, tetapi area topiknya sangat mirip dalam hal agenda berita. Keempat, dalam lingkungan berita jaringan digital baru, penguatan partisan telah menjadi efek yang semakin kuat. Tanda-tandanya adalah pembentukan opini yang terpolarisasi antara buruh.

Situs berita alternatif, agregator, penyebar, sangat bergantung secara simbiosis dan homogen pada operasi berita warisan untuk konten inti. Mereka mungkin menawarkan pendapat dan penekanan yang berbeda, tetapi area topiknya sangat mirip dalam hal agenda berita. Keempat, dalam lingkungan berita jaringan digital baru, penguatan partisan telah menjadi efek yang semakin kuat. Tanda-tandanya adalah pembentukan opini yang terpolarisasi antara buruh. Media baru memiliki karakteristik untuk memengaruhi opini publik.

- 1) Media menjadi pusat kekuasaan dalam politik, bisnis, dan media masih mengonsumsi berbagai media warisan dan mengaitkannya dalam politik sehari-hari
- 2) Media berita dengan segala bentuknya
- 3) Situs berita alternatif
- 4) Jaringan digital baru

Media *online* sebagai bentuk partisipasi politik alternatif masyarakat dalam mewujudkan demokrasi masyarakat modern. Media *cyber* membentuk kembali demokrasi melalui konsep demokrasi deliberasi yang di kembangkan Jurgen Habermas. Proses demokrasi sebagai langkah awal dalam demokrasi deliberatif yang berada diluar lembaga-lembaga formal dan bersifat informal (Habermas, 2015). Masyarakat sipil yang terdiri dari asosiasi dan organisasi menjadi jembatan penghubung dalam lembaga informal. Ruang publik, menurut Habermas, harus memberikan tempat untuk diskusi yang rasional dan bebas. Ini berarti warga memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat mereka, dan diskusi harus didasarkan pada argumen-argumen yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Habermas menganggap ruang publik sebagai wadah yang memungkinkan individu dan kelompok dapat mengemukakan aspirasinya. Melalui diskusi dan pertukaran ide, suara-suara ini menjadi bagian integral dari dari sebuah proses kebijakan. Harapannya melalui ruang publik ini dapat mewujudkan demokrasi deliberatif yang akomodir oleh pemilik kekuasaan. Disinilah pandangan Aeron Davis tentang bentuk partisipasi politik alternatif mengambil peran. Media alternatif sebagai kumulatif menurut Aeron Davis dapat mengubah cara pandang seseorang dalam menjalin hubungan dengan masyarakat dan urusan politik. Media kumulatif tersebut dapat berupa:

- 1) Media sosial
- 2) Situs web
- 3) Media massa
- 4) Komunikasi antar pribadi
- 5) Komunikasi kelompok

### c. Pengaruh kuat efek media: Dari Kuat ke Terbatas ke Kuat Kembali pada Fase ke Empat yang Baru

Media baru telah menawarkan banyak banyak peluang baru bagi masyarakat secara keseluruhan untuk terlibat lebih langsung dengan partai politik dan pemerintah. Dampak partisipasi alternatif ini sejak beberapa tahun lalu sudah mulai terlihat, mulai dari lembaga-lembaga negara yang telah mulai menyediakan informasi rinci tentang proses parlementer

terhadap publik. Mereka mengelola konsultasi publik *online* dan memfasilitasi petisi elektronik. Partai sekarang dapat berkonsultasi lebih banyak dengan anggota biasa, mengumpulkan dana, menyebarkan berita dan informasi politik alternatif, dan mengatur kegiatan lokal. Kedua, ekologi digital baru dapat meningkatkan partisipasi melalui bentuk-bentuk alternatif organisasi dan jaringan politik. Dengan demikian, kelompok kepentingan seperti organisasi lingkungan dapat terlibat dalam politik dan pembentukan kebijakan pemerintah.

Partai politik sekarang dapat berkonsultasi lebih banyak dengan anggota biasa, mengumpulkan dana, menyebarkan berita dan informasi politik melalui media alternatif, dan mengatur kegiatan lokal. Kedua, ekologi digital baru dapat meningkatkan partisipasi melalui bentuk-bentuk alternatif organisasi dan jaringan politik. Dengan demikian, kelompok kepentingan seperti organisasi lingkungan dapat terlibat dalam politik dan pembentukan kebijakan pemerintah.

Pengaruh media kumulatif dapat mengubah cara seseorang berhubungan dengan masyarakat dan urusan politik. Secara lebih umum, teori Noelle Neumann "Spiral of Silence" menjelaskan bahwa individu takut terisolasi dalam pendapat mereka dan keluar dari langkah dengan ide-ide dominan dan nilai dalam masyarakat. Akibatnya, individu-individu memiliki kecenderungan untuk menganut pandangan yang berlaku yang mereka lihat berulang kali di media.

Orang-orang memilih untuk mengikuti teman, jaringan, media, situs web, dan cerita yang mereka setuju sambil menghindari yang mereka tidak setuju. Publik tidak kalah tertarikannya dengan politik, berita, dan urusan publik. Mereka hanya merasa ditinggalkan oleh lembaga-lembaga dan cara politik tradisional di pusat mereka. Semakin pusat-pusat politik profesional berjuang dengan kompleksitas kebijakan, kekuatan global yang kuat, dan kemarahan pemilih, mereka semakin memblokir diri mereka sendiri. Media dan komunikasi tetap menjadi pusat politik bahkan ketika ekologi media berita terus berubah dan individu menjadi lebih paham media dan aktif. Bagaimana dan mengapa efek media beroperasi juga dapat berubah tetapi terus memberikan pengaruh.

Efek media jarang terlihat begitu jelas dan kuat memperlihatkan kemampuan sehingga mengubah pikiran dan perilaku secara instan (Davis, 2019). Namun pengaruh media terhadap politik dan publik selalu lebih mendasar dibandingkan dengan paradigma efek media terbatas apa pun. Ekologi media terus berubah dan seiring dengan hal tersebut individu pun menjadi lebih paham dan aktif terhadap beragam media. Bagaimana dan mengapa efek media yang berjalan juga dapat berubah, namun pengaruhnya tetap ada. Terkait dengan efek media bagi partisipasi politik masyarakat/ publik diserahkan sepenuhnya kepada peneliti untuk merevisi paradigma mereka dan menyesuaikan metode yang mereka gunakan.

#### **d. Partisipasi Politik Perempuan**

Sebagian besar diskusi teoritis mengenai representasi politik dimulai dengan Hanna Pitkin. Karya klasik Pitkin menentukan cara kita berpikir tentang representasi politik (Pitkin, 1967). Secara khusus, ia mengidentifikasi empat pandangan alternatif mengenai representasi:

- 1) Pandangan formalistik, yang berfokus pada proses otorisasi dan akuntabilitas
- 2) Representasi deskriptif, yang berfokus pada sejauh mana perwakilan "menyerupai" atau berbagi pengalaman tertentu dengan yang diwakili
- 3) representasi simbolik, yang mengkaji respon emosional orang yang diwakilkan terhadap wakilnya
- 4) Representasi substantif, yang menitikberatkan pada kegiatan memajukan kepentingan yang diwakili.

Masing-masing pandangan memberikan pendekatan alternatif untuk menilai kualitas dan keberhasilan keterwakilan perempuan. Konsep representasi itu sendiri bersifat paradoks: Setiap pandangan tentang representasi mengandung standar yang berbeda dan

terkadang bertentangan mengenai bagaimana perwakilan harus berperilaku. Misalnya, pandangan deskriptif tentang keterwakilan menilai perwakilan berdasarkan kesamaan mereka dengan konstituennya, misalnya, memiliki karakteristik ras tertentu. Sebaliknya, representasi substantif menilai perwakilan berdasarkan apakah mereka merupakan delegasi yang baik (mereka yang mengikuti preferensi konstituennya) atau wali yang baik (mereka yang mengikuti pemahaman mereka sendiri tentang kepentingan terbaik konstituennya). Pitkin menyarankan rekonsiliasi standar-standar yang kontradiktif ini dengan mengevaluasi perwakilan menurut "kepentingan terbaik" dari yang diwakili. Namun, menetapkan kriteria yang disepakati bersama akan diperlukan untuk menentukan "kepentingan terbaik" dari mereka yang diwakili, dan sayangnya, Pitkin tidak pernah merinci bagaimana kita harus mengidentifikasi kriteria tersebut.

Isu tentang partisipasi politik perempuan sudah menjadi sebuah isu yang tidak baru lagi dan asing bagi masyarakat. Partisipasi politik merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh rakyat. Lembaga-lembaga politik atau institusi-institusi politik tidak berhak membatasi partisipasi politik masyarakat dari golongan manapun. Pada dasarnya manusia memiliki keistimewaan menurut John Locke, diantaranya memperoleh hak istimewa seperti aktif dan memiliki keterlibatan dalam hal politik.

Mengacu pada "Perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik" (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) yang merupakan perjanjian hak asasi manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ICCPR adalah salah satu instrumen utama yang menetapkan hak-hak sipil dan politik dasar yang harus dihormati oleh negara-negara anggota PBB. Frasa "*The Rights Derive from the Inherent Dignity of the Human Person*" merupakan bagian dari Pramble (preambul) dari ICCPR. McClosky mendefinisikan ini sebagai natural rights, yakni setiap warga negara dengan kesadaran dan kerelaan ikut serta dalam Pemilu (Pemilihan Umum) untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjadi penguasa. Oleh karenanya partisipasi merupakan syarat mutlak terpenuhinya demokrasi yakni dengan memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang politik diwujudkan melalui kebijakan pemerintah.

Pandangan politik yang mencerminkan pemikiran Samuel P. Huntington tentang negara modern dan partisipasi politik. Huntington menganggap partisipasi politik sebagai cara bagi masyarakat untuk bersaing dalam mendapatkan jabatan penting dalam pemerintahan. Ini menyoroti pentingnya partisipasi sebagai mekanisme seleksi bagi para pemimpin dan pejabat publik. Negara modern yang demokratis memberikan ruang khusus bagi keterlibatan rakyat dalam jabatan-jabatan publik. Ini mencerminkan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan kekuasaan pada rakyat. Warga negara, tanpa memandang faktor-faktor seperti sosial, suku, ras, agama, dan golongan, seharusnya memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik. Ruang politik harus bebas dari stereotip dan diskriminasi yang dapat meminimalkan partisipasi setiap warga (Kleden & Ignas, 2003).

Affirmatif action merupakan upaya Indonesia untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan (Mulyono, 2010). Hal ini diatur dalam UU No. 12 tahun 2003.. Narasi ini bunyi pada Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003. Keterlibatan partai politik dalam mewujudkan partisipasi politik memegang peranan penting. Hal ini tercermin dari proses membangun kesadaran politik pada setiap anggota partai, pengurus dan simpatisan partai, tak terkecuali perempuan. Partisipasi politik perempuan dalam mewujudkan demokrasi sangat penting dan signifikan. Namun yang menjadi sangat disayangkan partisipasi politik perempuan sebagai upaya pemenuhan kebijakan afirmatif actioni saja. Pemenuhan partisipasi perempuan guna memenuhi kebijakan afirmatif nyatanya hanya sebagai alat atau media kampanye agar kaum hawa mau memilih dan berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya pada saat Pemilu berlangsung. Kondisi yang memperlihatkan jika perempuan masih minim dalam kontribusi pembangunan, pengambilan keputusan bahkan pemenuhan kuota 30% anggota legislatif menjadi bukti nyata jika perempuan masih sulit setara dengan laki-laki. Budaya patriarki juga memiliki sumbangsih untuk hal ini (Badan Pusat Statistik, 2023).

Partisipasi perempuan dapat dilihat dari keterwakilannya di ranah politik. Keterwakilan perempuan meningkatkan jumlah pejabat terpilih perempuan tidak secara



otomatis berarti bahwa lembaga-lembaga demokrasi akan lebih mendekati cita-cita demokrasi. Bagaimanapun juga, representasi politik belum tentu demokratis (Rehfeld, 2006). Oleh karena itu, meningkatkan keterwakilan perempuan tidak berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih demokratis. Hal ini terjadi bukan hanya karena perempuan tidak selalu menghargai institusi demokrasi (Dovi, 2002), namun juga karena meningkatkan keterwakilan sebagian perempuan dapat merugikan perempuan lainnya (Cohen, 2000). Peningkatan jumlah pejabat publik perempuan tidak boleh dianggap sebagai bukti kemajuan demokratisasi. Selain itu, seperti pendapat Adolph Reed, Jr, mobilisasi massa seputar identitas mungkin merupakan mode dominasi baru, sebuah "negatifitas buatan" yang menciptakan oposisi ilusi sehingga bahwa sistem manajemen sosial dapat mengendalikan oposisi tersebut (Young, 2002).

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Gambar, kata-kata menjadi ciri utama dalam pendekatan model ini (Lincoln & Guba, 1985). Unit analisis dalam penelitian adalah partisipasi politik perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif, yakni teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-dept interview*) kepada *key informan* dan *informan* yang berkaitan dengan penelitian ini, Observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap pimpinan dan kader PKS yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria, meliputi: pengalaman sebagai pengurus partai, mengetahui dan memahami politik PKS, menjadi kader, dan memiliki keterlibatan dalam kemenangan PKS di level tertentu.

*Key informan* dalam penelitian ini Annisah selaku Ketua PKK DPC PKS. Sedangkan *informan* adalah Trisila sebagai Ketua RKI, Erna S sebagai Caleg perempuan dari PKS tahun 2024, Dina Aulia sebagai anggota perempuan PKS.

Sementara data sekunder dikumpulkan melalui data yang diambil dari pihak ketiga seperti jurnal, buku, disertasi, tesis, dan lain sebagainya. Analisis data menggunakan tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yakni, (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Verifikasi data dilakukan dengan triangulasi metode, sumber dan teori.

### 4. Hasil dan Diskusi

PKS mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kiprah politik sebagai perwujudan demokrasi yang sehat. Beragam partisipasi politik perempuan di tunjukan oleh PKS melalui beragam media. Namun Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah dalam merepresentasikan kiprah perempuan di ranah politik masih dominan bersinggungan dengan perempuan pada ranah domestik (sebagai ibu, istri). Dalam struktur organisasi partai, representasi perempuan yang dominan tampak pada bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Bentuk kegiatan yang dilakukan perempuan di PKS sering dominan tampak pada PKS Senam Sehat, Direct Selling PKS, PKS Menyapa. PKS Menyapa memiliki beragam kegiatan, diantaranya PKS Berbagi, PKS Silaturahmi Tokoh, Narasumber pelatihan, narasumber kegiatan ilmiah seperti talkshow dan seminar.

Kesadaran politik dibangun dengan melakukan pengkaderan setiap pekannya melalui Ta`lim. Ta`lim dilakukan tidak hanya saat menjelang kampanye saja, namun dilakukan secara kontinu. hal yang disampaikan tidak hanya seputar politik saja, namun juga hal-hal terkait penguatan ruhiyah para anggota partai sebagai amunisi dalam berpolitik.

Partisipasi politik perempuan di tunjukan oleh PKS melalui komunikasi langsung dan masih minim dalam penggunaan media online/sosial. Media yang digunakan dalam membangun partisipasi politik perempuan diantara melalui RKI (Rumah Keluarga Indonesia). Menjelang Pemilu 2024, representasi kiprah politik perempuan sudah mulai terlihat menonjol di berbagai lini masyarakat melalui beragam aktifitas dengan melibatkan

kaum perempuan. Untuk meraih kemenangan politik tahun 2024, bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS kecamatan Bekasi Utara melalui lembaga RKI (Rumah Keluarga Indonesia).

Kader-kader perempuan yang terlibat dalam RKI berusaha bekerjasama dengan ibu-ibu PKK, Majelis Ta'lim, membuat beragam program untuk memperkenalkan PKS kepada masyarakat. Program-program tersebut menggandeng berbagai organisasi perempuan di masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan seperti, senam pagi, program berbagi, Silaturahmi Tokoh, pelatihan dan lain sebagainya. Kegiatan melalui RKI dianggap efektif sebagai media alternatif dalam memperkenalkan PKS kepada masyarakat Bekasi Utara, khususnya perempuan. Tentunya kegiatan ini melibatkan calon-calon legislatif perempuan PKS yang akan maju pada tahun 2024. Menariknya tidak jarang kegiatan yang dilakukan oleh kader-kader perempuan PKS dengan menyoal kaum perempuan, juga memperkenalkan Caleg laki-laki.

Strategi yang dilakukan oleh PKS terkait dengan penggunaan media alternatif yakni dengan *Digital Winning Strategy* (DWS). Humas diseluruh DPRa di wilayah DPC PKS diberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan seluruh tim humas. Selain Humas PKS, jajaran pengurus Rumah Keluarga Indonesia (RKI) juga memanfaatkan DWS dengan harapan melalui media sosial PKS dan RKI akan memberikan sebuah *stimulant* untuk meningkatkan partisipasi politik, khususnya kader perempuan. Selain itu bisa juga untuk meningkatkan jumlah pemilih PKS dan memberikan dukungan untuk memenangkan PKS pada pemilu 2024 mendatang.

Namun hal tersebut belum merata dilakukan oleh semua kader perempuan. Keaktifan kader perempuan menjelang PEMILU 2024 masih fokus pada media-media komunikasi langsung. Walaupun ada beberapa pengurus dan anggota perempuan aktif melalui media sosial, namun lebih karena mereka adalah timses pemenang Pemilu yang diminta oleh struktur untuk terus aktif mengisi konten-konten media sosial setiap harinya. Media sosial yang digunakan masih sebatas *Whatsapp*. Penyebaran Informasi-informasi seputar politik dan wawasan ke-Islam-an kepada para anggota disebarluaskan melalui *Whatsapp* yang disebut Ta'limat.

## 5. Kesimpulan

Perempuan secara emosional memiliki kedekatan kedekatan yang lebih kuat dengan isu-isu sosial dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif politik perempuan PKS efektif dalam mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik perempuan ditunjukkan melalui sarana sebagai pembicara/pelatih, perempuan, menjadi *influencer* partai. Dalam struktur organisasi partai, kiprah politik perempuan di PKS dominan tampak pada bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga dengan sasaran kegiatan para ibu rumah tangga.

Ta'lim menjadi bentuk alternatif efektif dalam mengedukasi sehingga mampu membangun partisipasi politik. Selain pengetahuan agama, pesan politik juga bisa diselipkan kepada peserta ta'lim. Strategi melalui kegiatan ta'lim sudah berlangsung sejak lama. Kegiatan ta'lim menjadi media membangun kesadaran politik perempuan selain pengetahuan agama dan yang lainnya.

Media sosial oleh PKS masih belum optimal dipergunakan, sehingga pengaruh kuat efek media 4.0 belum dijadikan pertimbangan rasional dalam membangun partisipasi politik perempuan.

## Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada informan yang berasal dari DPC Partai Keadilan Sejahtera dan anggota perempuan sebagai calon legislatif DPC Partai Keadilan Sejahtera.

**Kontribusi Penulis**

Seluruh tahapan penulisan mulai dari perancangan, penyusunan dan revisi ditulis oleh Siti Khadijah.

**Pendanaan:**

Penelitian ini tidak menerima dana eksternal.

**Pernyataan Dewan Peninjau Etis:**

Tinjauan etis dan persetujuan dibebaskan untuk penelitian ini karena tidak ada data pribadi yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Jumlah informan kunci dalam penelitian ini sebanyak empat orang untuk melengkapi data dalam artikel penelitian ini.

**Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan:**

Persetujuan berdasarkan informasi telah diperoleh dari semua subjek yang terlibat dalam penelitian ini.

**Pernyataan Ketersediaan Data:**

Data tersedia berdasarkan permintaan.

**Konflik Kepentingan:**

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan dan penerbitan artikel penelitian ini.

**Referensi**

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.
- Asy'ari, S. (2010). *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*. LKiS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2022*. Produk-Tabel Statistik, Gender Dan Kelompok Pupulasi Khusus. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>
- Cohen, C. J. (2000). The Boundaries of Blackness: AIDS and The Breakdown of Black Politics. *American Political Science Review*, 94(2), 457–458. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2586039>
- Crouch, C. (2004). Post-Democracy. *Themes for the 21st Century*.
- Dalton, R. J. (2004). *Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199268436.001.0001>
- Davis, A. (2019). *Political Communication: A New Introduction for Crisis Times*. Polity Press.
- Dewey, J. (2012). *The Public and Its Problems* (M. L. ROGERS (ed.)). Penn State University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.5325/j.ctt7v1gh>
- Dovi, S. (2002). Preferable Descriptive Representatives: Will Just Any Woman, Black, or Latino Do? *The American Political Science Review*, 96(4), 729–743. <http://www.jstor.org/stable/3117507>
- Dryzek, J. S. (2002). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=9iTqPrZAYX8C>
- Fishkin, J. S. (1991). *Democracy and Deliberation*. Yale University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1dt006v>
- Habermas, J. (2015). *The Theory of Communicative Action Lifeworld and Systems, a Critique of Functionalist Reason*, (Vol. 2). Polity Press.
- Huda, M. D., & Dodi, L. (2020). *RETHINKING PERAN PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya*. CV Cendekia Press.
- Inglehart, R., & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-

- Nots and Cultural Backlash. SSRN Electronic Journal.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2818659>
- Kleden, & Ignas. (2003). Analisis CSIS. *Jurnal CSIS*, XXXII(2).
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Macpherson, C. B. (1962). *The political theory of possessive individualism: Hobbes to Locke* (Vol. 14, Issue 56). Clarendon Press.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *The Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <http://www.jstor.org/stable/2747787>
- Mulyono, I. (2010). *Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif*.  
[https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/makalah\\_STRATEGI\\_MENINGKATKAN\\_KETERWAKILAN\\_PEREMPUAN\\_Oleh-Ignatius\\_Mulyono.pdf](https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUAN_Oleh-Ignatius_Mulyono.pdf)
- Noelle-Neumann, E. (2014). *The Spiral of Silence: Public Opinion--Our Social Skin* (C. T. Salmon, W. Donsbach, & Y. Tsifti (eds.)). Routledge.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Rehfeld, A. (2006). Towards a General Theory of Political Representation. *The Journal of Politics*, 68(1), 1–21. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2006.00365.x>
- Strolovitch, D. Z. (2007). Introduction. In D. Z. Strolovitch (Ed.), *Affirmative Advocacy: Race, Class, and Gender in Interest Group Politics* (p. 0). University of Chicago Press.  
<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226777450.003.0001>
- Young, I. M. (2002). *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press.